

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada hal ini, rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Pengakuan Indonesia sebagai negara demokrasi sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi”.

Pelaksanaan asas demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui adanya pemilihan umum atau pemilu sebagai bentuk keterbukaan politik yang dimulai sejak tahun 1998.<sup>1</sup> Pemilu memiliki keterkaitan yang erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, memiliki cara demokratis untuk membentuk pemerintahan perwakilan, serta sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif.<sup>2</sup> Dari hal ini maka pemilu adalah salah satu cara bagi rakyat untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui pemilu.

Pemilu memiliki makna yang sangat penting karena akan menentukan jalannya demokrasi di Negara ini. Apabila pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan baik, maka cerminan sistem demokrasi di negara ini juga tidak berjalan

---

<sup>1</sup>Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm. 38

<sup>2</sup>Linlin Maria dan Dion Marenda, *Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: KPU Bogor, 2010), hlm. 7

sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Salah satu bentuk pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan pilkada.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di seluruh wilayah Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>4</sup> Selain itu, Pilkada juga menjadi ajang untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat daerah, sebab sebelumnya Kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD, sedangkan saat ini pemilihan kepala daerah sudah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan pemilihan secara langsung, diharapkan kepala daerah yang terpilih benar-benar representatif dan aspirasi rakyat lebih terakomodasi.<sup>5</sup> Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pilkada secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pada hal ini penulis ingin memfokuskan pada pemilihan wali kota.

Salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan wali kota pada tahun 2020 adalah Kota Medan, dimana pada saat itu ada 2 kandidat calon Wali Kota Medan yaitu pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, serta pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan walikota Medan tahun 2020 sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Andi Faisal, *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu*, (Jakarta: FIKOM UP Press, 2016), hlm. 34

<sup>4</sup>KaroanaBudiargo Subekti, *Marekting Politik dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Kendal (Studi Penanganan Pasangan dr. Mirna, M.Si dan Masrur Masykur)*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 2

<sup>5</sup>Noor M Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 9

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah DPT Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020**

No	Keterangan	Jumlah
1	ftar Pemilih Tetap (DPT)	1.601.001
2	milih pengguna hak pilih	748.822
3	milih Golput	852.179
4	ara sah	735.907
5	ara tidak sah	12.915

*Sumber : KPU Kota Medan (2020)*

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa jumlah DPT dalam pemilihan walikota Medan tahun 2020 adalah 1.601.001 DPT, dimana dari jumlah tersebut maka pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 748.822 DPT. Dari jumlah pengguna hak pilih maka jumlah suara yang sah sebanyak 735.907 suara dan suara tidak sah sebanyak 12.915 suara. Hal menarik dari pemilihan Wali Kota Medan ini adalah keberadaan Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota sekaligus menantu Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Joko Widodo (Jokowi). Keterlibatan Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan menimbulkan asumsi adanya dinasti politik dari Presiden Jokowi, karena pada saat itu kakak ipar Bobby Nasution yaitu Gibran Rakabumingraka yang merupakan putra kandung Presiden Jokowi juga mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.

Dari latar belakang Bobby Nasution ini menimbulkan prediksi bahwa dirinya akan menang sebagai Wali Kota Medan dan banyak pihak yang mendukung Bobby Nasution, baik itu dari partai politik, politisi hingga organisasi masyarakat (ormas). Dukungan dari para pihak ini ternyata membuahkan hasil yang baik karena pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman berhasil menjadi Wali Kota Medan.

Secara lebih rinci jumlah perolehan suara antara pasangan Bobby Nasution dengan pasangan lawannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Akhyar Nasution-Salman Afarisi	342.580	46,50
2	Bobby Nasution-Aulia Rachman	393.327	53,50
	<b>Total</b>	<b>735.907</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : KPU Kota Medan (2020)*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman unggul 53,50% dengan perolehan suara 393.327 suara dibandingkan pasangan lawannya yaitu Akhyar Nasution-Salman Afarisi yang hanya memperoleh 46,50% atau 342.580 suara. Kemenangan pasangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan tentu tidak luput dari dukungan berbagai pihak, termasuk ormas pemuda pancasila (PP). Pada hal ini, hubungan antara ormas PP dengan Bobby Nasution adalah sebagai relasi, dimana Bobby Nasution diangkat sebagai Dewan Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila Kota Medan. Hubungan antara ormas PP dengan Bobby Nasution terjalin karena adanya rasa saling membutuhkan, seperti Bobby Nasution membutuhkan ormas PP untuk mendukung dirinya menjadi walikota Medan, sedangkan ormas PP membutuhkan Bobby Nasution untuk menjadi perantara aspirasi mereka dalam rangka memajukan Kota Medan.

Apabila dikaitkan dengan teori patronase, maka hubungan ormas PP dengan Bobby Nasution adalah saling memberikan penghargaan, dimana ormas PP memberikan penghargaan kepada Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan dengan menjadikannya sebagai Dewan Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila

Kota Medan, serta Bobby Nasution menjanjikan kepada ormas PP untuk menampung dan mewujudkan aspirasi ormas PP apabila dirinya terpilih menjadi walikota Medan. Dari hal ini maka hubungan politik antara Bobby Nasution dengan ormas PP adalah hubungan antara patron dengan klien, dimana Bobby sebagai patron bersedia memberikan bantuan akomodasi maupun dana jika ormas PP memiliki berbagai kegiatan, sedangkan ormas PP sebagai klien mendukung Bobby sebagai wali kota dan menjadikan Bobby sebagai Dewan Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila Kota Medan. Hal ini dikarenakan dalam teori patronase dijelaskan bahwa patronase merupakan dukungan, dorongan, hak istimewa atau bantuan keuangan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada orang lain. Selanjutnya dalam patronase tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya untuk memberi penghargaan kepada individu atas dukungan electoral mereka.

Pada dasarnya, Pemuda Pancasila (PP) merupakan organisasi Indonesia yang didirikan oleh Jendral Abdul haris Nsution pada 28 Oktober 1959. Kemudian sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Organisasi PP ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi yang mendukung pemerintahan orde baru Soeharto. Organisasi PP ini banyak terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Medan. Pembentukan organisasi PP di Kota Medan pada tahun 1961 dengan tugas pokok menjaga NKRI, mengawal dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 dari PKI. Saat ini pimpinan cabang PP Kota Medan adalah Rahmaddian Shah.

Salah satu bentuk dukungan dari pemuda pancasila (PP) terhadap Bobby nasution adalah melalui pernyataan sikap seluruh kader PP mendukung Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan melalui surat pernyataan penandatanganan

fakta integritas antara Bobby Nasution, Ketua Majelis Pimpinan Cabang PP Kota Medan dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PP Sumatera Utara. Pada pernyataan tersebut, PP Kota Medan mewajibkan setiap kadernya untuk mendukung Bobby Nasution.<sup>6</sup> Pada saat itu jumlah kader PP Kota Medan sebanyak 40 orang dan ormas ini dikenal sebagai organisasi masyarakat yang cukup aktif dalam setiap kegiatan, karena ormas PP sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini yang menyebabkan para simpatisan Bobby Nasution dari ormas PP Kota Medan terus berorasi menyatakan dukungannya terhadap Bobby Nasution dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, anggota keluarga dari seluruh kader PP Kota Medan dan orang-orang yang memiliki relasi dengan PP untuk memilih Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

Pernyataan dukungan dari ormas PP Kota Medan ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan pada pemilihan tahun 2020. Hal ini dikarenakan ormas PP dikenal memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks sosial dan politik, baik dari aspek organisasinya maupun dari sisi basis masanya. Artinya dalam hal ini pengaruh ormas PP Kota Medan terhadap kemenangan Bobby Nasution adalah memberikan dukungan dan memilih Bobby Nasution pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran pemenangan PP terhadap Bobby Nasution adalah peran aktif dan peran partisipatif, karena dalam hal ini ormas PP secara aktif

---

<sup>6</sup>Sartana Nasution, Pemuda Pancasila Pecat Anggotanya yang Tak Dukung Bobby-Aulia, <https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/185072/717/pemuda-pancasila-pecat-anggotanya-yang-tak-dukung-bobby-aulia-1601755857> diakses 9 Februari 2023

mengkampanyekan Bobby Nasution dan menghimbau seluruh anggota ormas PP dan orang-orang terdekatnya untuk mendukung Bobby Nasution. Selanjutnya para anggota ormas PP Kota Medan juga secara partisipatif atau terlibat secara langsung dalam mencari masa dan mendukung Bobby Nasution.

Dari hal tersebut, maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai hubungan yang terjadi antara Bobby Nasution dengan ormas PP. Tujuannya adalah untuk mencari informasi mengenai sejauh mana dukungan yang diberikan ormas PP kepada Bobby Nasution, serta hal-hal yang dilakukan oleh Bobby Nasution untuk membalas dukungan dari ormas PP, sehingga nantinya dapat diketahui mengenai penerapan konsep patronase dalam pelaksanaan politik di Kota Medan. Selain itu, penelitian ini juga penting dan menarik untuk dilakukan, mengingat selama ini ormas PP dikenal memiliki berbagai kontroversi karena adanya isu-isu yang kurang baik mengenai ormas tersebut, tetapi di Kota Medan sendiri justru keberadaan ormas PP menjadi salah satu faktor penting bagi kemenangan Walikota Medan. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai dukungan yang diberikan ormas PP terhadap Bobby Nasution, sehingga terlihat hubungan yang terjadi antara ormas PP dengan Bobby Nasution.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai keterlibatan ormas PP dalam pemilihan umum. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Ananda dengan judul “Mobilisasi Politik: Ormas dalam Kontestasi Politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018”. Penelitian ini membahas mengenai peran mobilisasi yang dilakukan oleh ormas PP Jawa Timur untuk

memberikan komando dan arahan kepada seluruh kader dalam majelis pimpinan wilayah, majelis pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, tingkat kelurahan hingga kader tingkat RW agar memberikan dukungannya kepada Khofifah-Emil. Pada hal ini, PP Jawa Timur melakukan mobilisasi suara menggunakan strategi persuasive satu komando mulai dari tingkat MPW hingga anak ranting untuk memilih pasangan Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.<sup>7</sup>

2. Singarimbun dkk dengan judul “Ormas dalam Politik (Hubungan Patron Klien Pemuda Pancasila dan Pasangan Eramas dalam Pilgub Sumut Tahun 2018)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda pancasila memberikan dukungan penuh kepada Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (ERAMAS) di pilgub tahun 2018 didasari adanya hubungan kedekatan yang terjalin diantara kedua belah pihak. Hubungan ini melahirkan jaringan kerjasamadiantara kedua pihak untuk bersama-sama memenangkan pasangan ERAMAS. Kontribusi yang diberikan Pemuda Pancasila adalah membentuk konsolidasi dengan memperkenalkan pasangan ERAMAS kepada seluruh kader dan masyarakat.<sup>8</sup>
3. Fariz dengan judul “Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dan Demokrat dalam Mobilisasi Massa pada Pilkada Surabaya Tahun 2018”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepentingan Pemuda Pancasila dalam dukungan kepada Rasiyo –Lucy erat kaitannya dengan hubungan politik antara

---

<sup>7</sup>Moh. Fachrul Ananda, Mobilisasi Politik: Ormas dalam Kontestasi Politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2019

<sup>8</sup>Hagai Zefanya Christiano Singarimbun., Muhammad Ali Azhar dan Piers Andreas Noak, Ormas dalam Politik (Hubungan Patron Klien Pemuda Pancasila dan Pasangan Eramas dalam Pilgub Sumut Tahun 2018), *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2019

La Nyalla sebagai elit Pemuda Pancasila dengan Soekarwoelit Demokrat yang menjadi partai pengusung Raiyo-Lucy. Pada hal ini pengaruh Pemuda Pancasila diberikan dengan melakukan mobilisasi suara kepada seluruh masyarakat agar mendukung Rasiyo-Lucy.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dukungan Politik Pemuda Pancasila Kota Medan dalam Pemilihan Walikota Tahun 2020”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apa hubungan politik Pemuda Pancasila Kota Medan terhadap Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota tahun 2020?
2. Apa bentuk dukungan politik yang diberikan oleh Pemuda Pancasila Kota Medan terhadap kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota tahun 2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan politik Pemuda Pancasila Kota Medan terhadap Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota tahun 2020.

---

<sup>9</sup>Moch. Wildan Fariz, Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dan Demokrat dalam Mobilisasi Massa pada Pilkada Surabaya Tahun 2018, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2016

2. Untuk mengetahui dukungan politik yang diberikan oleh Pemuda Pancasila Kota Medan terhadap kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota tahun 2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkhusus bagi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum.
2. Bermanfaat bagi organisasi dapat dijadikan sebagai acuan mengenai dukungan politik terhadap salah satu calon kepala daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pengaruh pemuda pancasila dalam pemilihan kepala daerah.

#### **1.5. Landasan Teoritis**

##### **1.5.1. Teori Patronase**

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron disatu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat, sehingga dalam kondisi demikian interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun keduanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme* Pada Pemilu Legislatif 2014, (Yogyakarta: PolGov, 2016), hlm. 129

Patronase dapat didefinisikan sebagai sistem politik yang berlandaskan pada “relasi vertikal”. dengan kata lain, hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara, antara pemimpin (Patron) dengan pengikutnya (klien) masing-masing pihak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan dukungan politik dan penghormatan kepada patron, yang ditampilkan dalam berbagai bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah dan lain-lain). Di sisi lain, patron menawarkan kebaikan, pekerjaan, dan perlindungan kepada kliennya. Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti Bapak, dan pater berubah menjadi patris dan patronis yang berarti bangsawan atau patricius yang berarti seseorang yang dianggap sebagai pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya. Sebaliknya klien atau client berasal dari kata client yang berarti pengikut. Patron dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih tinggi atau superior, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.

Patronase juga dapat diartikan sebagai hubungan patron dengan klien sebagaimana didefinisikan oleh James Scott pada tahun 1972 dalam jurnal yang berjudul “*Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia:*

*American Political Science Association* “ adalah relasi pertukaran yang bersifat tatap muka, antara orang yang lebih tinggi kedudukannya sosial ekonominya dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, dan pihak yang lebih tinggi lebih banyak memberikan bantuan material atau ekonomi, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya hanya memberikan bantuan berupa jasa<sup>11</sup> Menurut pandangan Scott bahwa hubungan patronase terjadi ketika kelompok yang memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan tertentu, seperti politisi atau pejabat pemerintah, memberikan bantuan kepada kelompok yang memiliki keterbatasan akses sumber daya.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori Scott bahwa patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara, tetapi saling membutuhkan. Pada satu pihak, kaum patron muncul sebagai individu yang memiliki kelebihan, baik dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Sementara itu dilain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang dimiliki oleh seorang patron.<sup>13</sup> Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan pertukaran kepentingan. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Leo Agustino, Patronase Politik Pada Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 11, Nomor 2, 2014, hlm. 71

<sup>14</sup>*Ibid.*

Dari teori Scott dijelaskan bahwa mekanisme hubungan antara kelompok patron dengan klien sebagai berikut:

- a. Kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya.
- b. Sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.<sup>15</sup>

Hubungan patron-klien tersebut tidak saja terbatas pada eksploitasi tetapi sampai kepada tingkat ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya.<sup>16</sup> Berdasarkan konsep tersebut, maka hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Dengan kata lain, kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan (*interest*) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum. Pada pertukaran itu, pihak klien harus menunjukkan loyalitas dan kesetiaan kepada patron.<sup>17</sup>

Selanjutnya Scott juga berpendapat bahwa hubungan patronase ini dapat bermanfaat jika dalam waktu jangka pendek, tetapi dapat memperluas kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Scott

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 71

<sup>16</sup>Moh. Hefni, *Patron-Client Relationship Pada Masyarakat, Jurnal Karsa, Volume XV, Nomor 1, 2010, hlm. 17*

<sup>17</sup>*Ibid.*

juga berasumsi bahwa hubungan patronase dapat digunakan oleh rakyat kecil sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan yang dominan, karena mereka dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memperoleh akses ke sumber daya dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan kelompok mereka.

Pada hakikatnya, fenomena hubungan patronase merupakan hubungan yang penuh emosional pribadi antara orang yang mengabdikan dan memperabdikan yang kemudian disebut patron klien. Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual antara si patron dengan si klien, dan terjadi suatu interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa material. Sementara itu klien memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa yang paling banyak menikmati hasil dari hubungan ini adalah patron, sebab ialah yang memiliki sumber daya yang besar dan lebih kuat dibandingkan dengan klien.

Dari teori-teori tersebut, apabila dikaitkan dengan judul dan tujuan penelitian ini, maka dalam hal ini terjadi hubungan patronase antara ormas PP dengan Bobby Nasution yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada pemilihan walikota Medan tahun 2020. Pada hal ini, Bobby Nasution adalah patron, karena dirinya memiliki kekuatan sumber daya, berupa kedudukan sosial, jaringan dan kekuatan modal yang dapat

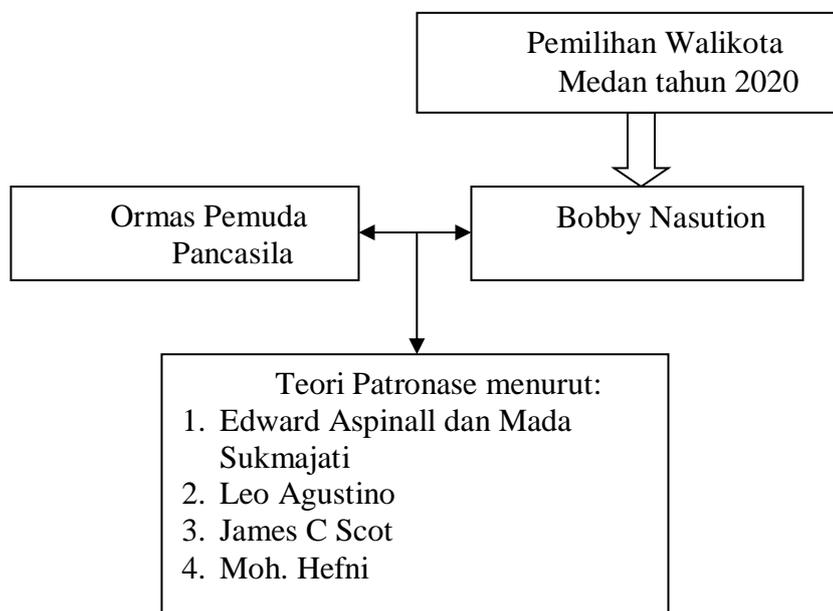
digunakan untuk memberikan bantuan kepada ormas PP. Sementara itu, ormas PP berperan sebagai klien, karena ormas PP ini memiliki keterbatasan penguasaan atas sumber daya, sehingga ormas ini mengabdikan dengan cara memberikan dukungan kepada Bobby Nasution sebagai patron. Tujuan Bobby Nasution membangun hubungan dengan ormas PP sebagai klien adalah untuk memperoleh dukungan agar dirinya terpilih sebagai walikota, sedangkan tujuan ormas PP untuk mendukung Bobby Nasution adalah untuk memperoleh kemudahan akses akan sumber daya yang dimiliki oleh Bobby, seperti memperoleh bantuan dana untuk berbagai kegiatan dan lain sebagainya.

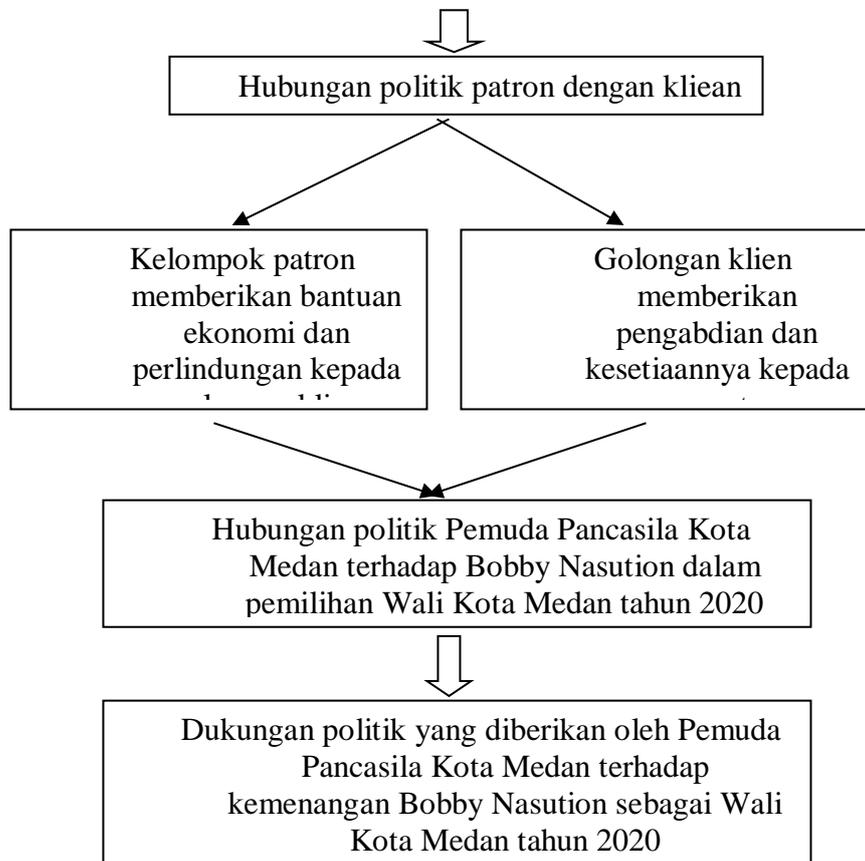
#### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada teori patronase yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana dalam teori patronase tersebut dijelaskan adanya hubungan antara kelompok patron dengan kelompok klien. Kelompok patron adalah kelompok yang memiliki status sosial tinggi dan kaya akan sumber daya, sedangkan kelompok klien adalah kelompok bawah yang minim akan sumber daya. Mengacu dari teori patronase menurut James Scott bahwa hubungan patronase terbentuk ketika adanya rasa saling membutuhkan dan ketergantungan antara patron dengan klien. Konsep patronase juga memungkinkan untuk memahami peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan politik sering terjadi hubungan politik antara kelompok patron dengan klien, dimana patron adalah pihak yang memiliki

kepentingan untuk memperoleh dukungan, sedangkan klien adalah masyarakat atau pihak yang membutuhkan bantuan dari patron.

Fenomena patronase ini juga terjadi dalam hubungan politik antara Bobby Nasution dengan ormas PP Kota Medan. Pada hal ini, hubungan politik antara Bobby Nasution dengan ormas PP Kota Medan dilihat berdasarkan apa yang telah diberikan Bobby untuk ormas PP, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:





## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengkaji mengenai hubungan politik Pemuda Pancasila terhadap Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020, serta dukungan politik yang diberikan oleh Pemuda Pancasila terhadap kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan tahun 2020.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah kantor ormas PP Kota Medan yang beralamat di Jl. Sutrisno, No. 182, RT. 02, Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena ormas PP menjadi objek utama dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan di KPU Kota Medan dan beberapa wilayah di Kota Medan sebagai lokasi tim sukses Bobby Nasution, pengamat politik dan masyarakat.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 24

gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.<sup>19</sup>

Fokus dari penelitian ini adalah hubungan politik Pemuda Pancasila terhadap Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020, serta dukungan politik yang diberikan oleh Pemuda Pancasila terhadap kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan tahun 2020.

#### **1.7.4.Sumber Data**

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 209.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 225

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 225.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini menjadi penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, dokumen-dokumen atau laporan dan lain sebagainya.

#### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah pihak-pihak yang memahami mengenai hubungan politik Pemuda Pancasila terhadap Bobby Nasution, serta dukungan politik yang diberikan oleh Pemuda Pancasila terhadap kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	maluddin Tanjung	kretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Medan

2	Arlin Sitanggang	der Pemuda Pancasila Kota Medan
3	anny Sihotang	m sukses Bobby Nasution
4	y Suharno	tua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Medan
5	bangda Jhon Lebes	ngamat Politik Kota Medan
6	ongSiregar	asyarakat Kota Medan
7	isa Ginting	asyarakat Kota Medan
8	rangSembiring	asyarakat Kota Medan
9	triaPurba	asyarakat Kota Medan

#### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>22</sup>

b. Observasi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.231-232

Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena dilapanan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa) peneliti sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.<sup>23</sup>Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.<sup>25</sup> Adapun dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu seperti foto, daftar hadir, laporan kegiatan, dokumen, dan lain-lain.

#### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data, data dikumpulkan diawali dengan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian di lanjutkan dengan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 231.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 226.

<sup>25</sup>*Ibid*.

melakukan wawancara dengan informan penelitian. Peneliti juga mengambil dokumentasi untuk mendukung data penelitian.

- b. Reduksi Data, mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya peningkatan aksesibilitas yang disediakan.
- c. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang dilakukan selanjutnya.
- d. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.

#### **1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)**

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi.

Dalam penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:<sup>26</sup>

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

---

<sup>26</sup> J.W. Creswell, *Op. Cit.* hlm. 254

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

## 2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

## 3. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data

ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

#### 4. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.